



Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Nathasya Prissillya Aggatha ¹⁾; Sri Rahayu ²⁾; Wahdan Arum Inawati ³⁾

^{1),2),3)}Study Program of Accounting, Faculty of Economics and Business, Telkom University

Email: ¹⁾ nathasyaaggatha13@gmail.com ; ²⁾ srirahayu@telkomuniversity.ac.id ;

³⁾ aruminawati@telkomuniversity.ac.id

How to Cite :

Aggatha, N. P., Rahayu, S., Inawati, W. A. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. EKOMBIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [20 Oktober 2022]

Revised [22 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

KEYWORDS

Human Development Index, Audit Opinions, Government Complexity, Regional Wealth, Disclosure of Financial Information on the Regional Government

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Riset ini dilakukan untuk mengetahui apakah indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, dan kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Teknik sampel jenuh diaplikasikan dalam pengumpulan sampel, dan sampel dalam riset ini mencakup seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Riset ini menerapkan analisis regresi linier berganda dengan memanfaatkan software IBM SPSS versi 26. Hasil temuan riset menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, dan kekayaan daerah seluruhnya memiliki dampak secara simultan pada pengungkapan informasi keuangan. Sementara itu, secara parsial hanya variabel kekayaan daerah yang memiliki dampak terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020.

ABSTRACT

This research was conducted to determine whether human development index, audit opinions, government complexity, and regional wealth have an effect on disclosure of financial information on the regional governments official website in Indonesia. The saturated sample technique was applied in sample collection, and the sample in this research covers all provincial governments in Indonesia in 2020. This research applies multiple linear regression analysis using IBM SPSS version 26 software. The research findings confirm that the human development index, audit opinion, government complexity, and regional wealth all have a simultaneous impact on the disclosure of financial information. Meanwhile, partially only regional wealth variables have an impact on the disclosure of financial information on the official websites of local governments throughout all provinces in Indonesia in 2020.

PENDAHULUAN

Pengungkapan Informasi Keuangan dalam website Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui website resmi milik pemerintah daerah (Fachru, 2018). Informasi keuangan tersaji dalam laporan keuangan. Sedangkan informasi non keuangan dapat berupa informasi umum yang meliputi keahlian, teknologi, pengetahuan, keterampilan, pelanggan, karyawan, peraturan dan lainnya yang menjadi kualitas yang dimiliki perusahaan untuk proses pembentukan nilai. Pentingnya pengungkapan seluruh informasi pada laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kesalahpahaman dalam membaca laporan. Sehingga, pengungkapan informasi keuangan sebaiknya disediakan dengan memenuhi unsur-unsur pengungkapan dan aturan yang disediakan guna mencapai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan maupun non keuangan.

Ditjen Perimbangan Keuangan (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa produk hukum yang mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) menyajikan informasi mengenai keuangan daerah diantaranya yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan mini riset yang telah dilakukan penulis, tidak semua provinsi melakukan pengungkapan atas informasi keuangan dan non keuangan melalui website resmi pemerintah daerah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 hanya sebanyak 14 provinsi atau sebesar 41,1% yang melakukan pengungkapan informasi keuangan secara lengkap, dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sebanyak 20 atau sebesar 58,8% provinsi di Indonesia tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan secara penuh pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia relatif masih rendah (Nurhidayati & Rahayu, 2020). Menurut riset yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website resmi pemerintah daerah, yaitu kondisi keuangan, opini audit, kekayaan pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat (Nurhidayati & Rahayu, 2020), ukuran pemerintah, umur pemerintah, jumlah penduduk, temuan audit (Budiarto & Indarti, 2019), belanja daerah, tingkat kemandirian (Fachru, 2018), pendapatan asli daerah, kompleksitas pemerintah (Hadis, 2018), indeks pembangunan manusia (Utami & Sulardi, 2019).

Faktor pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP), indeks pembangunan manusia merupakan gabungan parameter dalam mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Utami & Sulardi (2019) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga hal ini dapat memotivasi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

Faktor kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Opini Audit. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa opini audit merupakan pernyataan profesional (BPK) sebagai simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran kandungan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Menurut Makmum & Rahayu (2018) dalam penelitian Nurhidayati & Rahayu (2020) fungsi dari opini audit guna menanamkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap kinerja keuangan dan integritas pemerintah daerah. Namun, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa tingkat opini audit tidak menjamin kinerja pemerintah daerah yang baik atau terbebas dari tindak korupsi (Fachru, 2018).

Faktor ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Pemerintah. Hadis (2018) menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah dapat dilihat dari jumlah penduduk di suatu daerah tertentu. Jumlah penduduk menjadi salah satu komponen yang merepresentasikan

tingginya keperluan pendanaan terhadap penyedia layanan publik pada masing-masing daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Martani & Liestiani (2012) dalam penelitian Kurniati & Siddi (2020) jumlah penduduk yang besar mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan publik yang jauh lebih besar pula.

Faktor keempat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kekayaan Pemerintah Daerah. Kekayaan pemerintah daerah merupakan sumber daya pendukung dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah serta dapat menjadi tolak ukur kemakmuran suatu daerah, secara ekonomi terjadinya peningkatan kemakmuran akan diimbangi dengan tingginya perolehan kekayaan daerah (Fachru, 2018). Nurhidayati & Rahayu (2020) menjelaskan bahwa kekayaan daerah yang tinggi dapat memungkinkan pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Signaling Theory

Brigham & Houston (2015) yang berjudul *"Fundamentals of Financial Management"* menjelaskan terkait teori sinyal, bahwa sinyal atau isyarat ialah suatu tindakan yang diadopsi manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi suatu hal yang dijalankan oleh manajemen agar keinginan pemilik terealisasikan. Menurut Jessica & Suhartono (2020), *signaling theory* memaparkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diamanahkan oleh rakyat bermaksud ingin menunjukkan sinyal. Sinyal yang disalurkan kepada masyarakat berupa menyajikan laporan keuangan yang andal, meningkatkan sistem internal kontrol, penjelasan lebih detail dalam *website*. Untuk mengoptimalkan permintaan masyarakat, pada akhirnya pemerintah melakukan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah di Indonesia.

Pengungkapan Informasi Keuangan *Website* Resmi Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berfokus mengenai setiap kepala instansi diwajibkan merangkai dan menyajikan laporan keuangan terkait lembaga yang dipimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kemudian laporan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini didukung dengan terbitnya Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Kualitas Pelaporan Informasi Keuangan yang berisi anjuran dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam BPS (2020) dijabarkan bahwa IPM berfungsi untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang di milikinya dalam pembangunan dengan berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, standar hidup yang layak, dan pengetahuan. Kualitas hidup manusia mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketersediaan informasi pada laporan keuangan untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah (Faruqi, 2020). Hal ini dikarenakan kekritisian dan keberagaman keinginan dari masyarakat akan memicu desakan terhadap pemerintah dalam melakukan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan.

Opini Audit

Berdasarkan pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004, opini BPK ialah pernyataan profesional pemeriksa terkait keabsahan pada informasi keuangan. Diperoleh beberapa kriteria dalam

merumuskan opini audit yang sesuai dengan SAP meliputi kelengkapan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan (*adequate disclosure*), ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). Kecukupan pengungkapan informasi penting bagi auditor untuk merumuskan opini audit, dikarenakan informasi terkait keuangan daerah harus disajikan secara optimal sesuai guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Auditor merumuskan opininya bertumpu pada audit yang dilangsungkan sesuai SAP yang telah ditentukan. Pengungkapan informasi keuangan akan meningkat seiring perolehan tingkat kewajaran opini BPK yang auditor berikan.

Kompleksitas Pemerintah

Menurut Evada et al. (2020), kompleksitas dalam pemerintahan ialah kondisi di mana berbagai faktor dengan berbagai karakteristik mempengaruhi pemerintah secara langsung atau secara tidak langsung. Kompleksitas pemerintah dapat ditinjau melalui jumlah penduduk yang berada di daerah tertentu. Jumlah penduduk menjadi faktor yang menggambarkan besarnya kebutuhan pendanaan daerah untuk menjalankan fungsi layanan publik di berbagai daerah. Semakin kompleks pemerintah dalam melakukan kegiatan akan berpengaruh terhadap lebih banyak informasi yang diungkapkan sebagai usaha untuk meminimalisir kesenjangan informasi dan membuktikan kinerja pemerintah sebagai pemegang amanah. Banyaknya jumlah penduduk akan akan memicu munculnya beragam tuntutan dari masyarakat untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan sebagai upaya meningkatkan kebutuhan pelayanan publik.

Kekayaan Daerah

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kekayaan pemerintah daerah menjadi satu dari banyaknya faktor yang dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Parameter kekayaan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap daerahnya. PAD

Kekayaan daerah yang tinggi akan diikuti dengan besarnya perolehan aset. Akibatnya, pemerintah harus memenuhi syarat transparansi pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari kekhawatiran terkait penyelewengan dana daerah. Semakin besar perolehan kekayaan daerah, sehingga semakin besar probabilitas daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan pemerintah daerah pada *website* resminya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Karena data yang diuji berupa angka-angka dan analisis statistik, maka digunakan metodologi penelitian, yang disebut kuantitatif guna menjawab hipotesis yang telah ditetapkan. *Software* yang digunakan selama pengujian ialah *IBM SPSS* versi 26 dengan mengadopsi *multiple regression analysis*. Sampel pada riset ini ialah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020, yang diperoleh melalui metode teknik sampling jenuh (*non probability sampling*). Seluruh anggota dari populasi dimanfaatkan sebagai sampel, sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 34 data. Data sekunder dari variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia dan kompleksitas pemerintah yang diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>), variabel opini audit bersumber dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<https://www.bpk.go.id/>), sedangkan variabel kekayaan daerah bersumber dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). Data sekunder dari variabel dependen yaitu pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang bersumber dari website resmi pemerintah daerah.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y : Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

- α : Konstanta
 X1 : Indeks Pembangunan Manusia
 X2 : Opini Audit
 X3 : Kompleksitas Pemerintah
 X4 : Kekayaan Daerah
 β_1 - β_4 : Koefisien Regresi
 ε : *Error Term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Statistik Deskriptif

Uji ini dilakukan untuk memaparkan hasil pengolahan data dari variabel dependen dan variabel independen dengan menyajikan nilai *minimum* (nilai terkecil), *maximum* (nilai terbesar), *mean*, dan standar deviasi setiap variabel. Sampel (N) dalam riset ini ialah 34 sampel yang diambil dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2020. Berikut hasil analisis statistik deskriptif menggunakan *IBM SPSS 26* dalam riset ini.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	34	60.44	80.77	71.0809	3.90188
X2	34	.00	1.00	.9706	.17150
X3	34	13.00	18.00	15.2941	1.11544
X4	34	26.57	31.25	28.3483	1.15433
Y	34	.08	0.84	.4118	.22250
Valid N (listwise)					

Sumber: Data Diolah, 2022

Menurut Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *mean* seluruh variabel yaitu indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, kekayaan daerah, dan pengungkapan informasi keuangan memiliki nilai *mean* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasinya. Sehingga dari hal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa data variabel yang diambil cenderung berkelompok atau tidak bervariasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan yaitu uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heterokedastisitas, dan uji Autokorelasi dan memperoleh hasil yang baik sesuai kriteria yang ditentukan. Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
(Constant)	-2.737	.985		-2.778	.009
X1	-.001	.011	-.012	-.060	.952
X2	-.092	.201	-.071	-.458	.651
X3	-.041	.062	-.207	-.664	.512
X4	.138	.067	.717	2.054	.049

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.510	4	.127	3.287	.024 ^b
Residual	1.124	29	.039		
Total	1.634	33			

Sumber: Data Diolah, 2022

Dilihat dari Tabel 2 persamaan regresi linier berganda pada riset ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = -2.737 - 0.001 X_1 - 0.092 X_2 - 0.041 X_3 + 0.138 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dilakukam sebagai alat ukur dalam menilai seberapa baik kemampuan model dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.312	.127	.19688

Sumber: Data Diolah, 2022

Menurut hasil pengujian R² pada tabel 4, nilai *Adjusted R Square* ialah sebesar 0.127 (21,7%). Sehingga kesimpulan yang diperoleh yaitu variasi dari pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 yang dapat dijelaskan oleh indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah dan kekayaan daerah sebesar 21,7%. Sedangkan sisanya sebesar 78,3% hal ini terpengaruh oleh faktor lainnya yang berasal dari luar variabel riset.

Hasil Pengujian Simultan (F)

Tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa hasil pengujian hipotesis simultan (Uji F) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,024. Hal tersebut menunjukkan perbandingan Sig. sebesar $0,024 < 0,05$ yang artinya variabel pengungkapan informasi keuangan secara simultan dan signifikan dipengaruhi oleh variabel indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, serta kekayaan daerah sehingga dapat dikatakan H_a diterima.

Hasil Pengujian Parsial (T)

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam Tabel 2 dihasilkan nilai signifikansi Indeks Pembangunan Manusia sebesar $0,952 > 0,05$ yang mencerminkan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial tidak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan. Perihal hasil ini artinya tingginya perolehan skor indeks pembangunan manusia tidak dijadikan faktor utama bagi pemerintah dalam mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia diatas rata-rata berarti telah mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat pada suatu daerah. Namun hal tersebut tidak cukup mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan. Hasil ini menunjang hasil riset yang dilakukan oleh Puspa & Rahayu (2021) yang

menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Indeks Pembangunan Manusia	Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan				Total
	Diatas Rata-Rata (0,4118)		Dibawah Rata-Rata (0,4118)		
Diatas Rata-Rata (71,081)	12	35%	7	21%	19
Dibawah Rata-Rata (71,081)	6	18%	9	26%	15
Total	18		16		34

Sumber: Data Diolah, 2022

Hal ini dapat dibuktikan oleh Tabel 6 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 35% atau 12 sampel data dengan skor Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata sebesar 71,081 yang melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada website Resmi Pemerintah Daerahnya. Selanjutnya sebesar 21% atau 7 sampel data dengan skor Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata sebesar 71,081 tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan. Sementara itu, sebesar 18% atau 6 sampel data dengan skor Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan. Kemudian sisanya sebesar 26% atau 9 sampel data lainnya yang memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan di bawah rata-rata. Situasi tersebut menjelaskan ditemui beberapa pemerintah provinsi dengan perolehan skor indeks pembangunan manusia yang tinggi tetapi cenderung tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan. Adanya ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia bukan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan.

Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi Opini Audit sebesar $0,651 > 0,05$ yang membuktikan bahwa opini audit secara parsial tidak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan. Perihal ini artinya daerah yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut akan melakukan pengungkapan informasi keuangan. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah daerah yang meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi hal tersebut tidak cukup memotivasi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

Tabel 6. Opini Audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Opini Audit	Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan				Total
	Diatas Rata-Rata (0,4118)		Dibawah Rata-Rata (0,4118)		
Opini WTP	17	50%	16	47%	33
Opini Non WTP	1	3%	0	0%	1
Total	18		16		34

Sumber: Data Diolah, 2022

Kesadaran masyarakat terkait keterbukaan informasi dan definisi mengenai opini audit cenderung rendah. Masyarakat beranggapan jika perolehan opini audit berupa WTP maka laporan keuangan tersaji dengan baik. Sedangkan perolehan kewajaran opini audit tidak menjadi tolak ukur keberhasilan laporan keuangan. Budiarto & Indarti (2019), Fachru (2018), serta Utami & Sulardi

(2019) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

Situasi ini dapat diselaraskan dengan tabel 6 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 97% atau 33 daerah yang meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hanya 50% atau 17 daerah yang melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Serta sebesar 3% atau 1 daerah yang meraih opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun daerah tersebut mampu melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak serta merta pengungkapan informasi keuangan yang tinggi akan memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi Kompleksitas Pemerintah sebesar $0,512 > 0,05$ yang mencerminkan bahwa kompleksitas pemerintah secara parsial tidak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan. Dapat disimpulkan kalau kompleksitas yang direfleksikan melalui jumlah penduduk daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi tidak menjamin bahwa masyarakat akan lebih peduli dengan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak terdorong untuk melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan di internet, khususnya di *website* resmi pemerintah daerah.

Hasil ini menunjang hasil riset yang dilakukan oleh Hadis (2018) yang juga menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tabel 7 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 35% atau 12 sampel data dengan Kompleksitas Pemerintah di atas rata-rata cenderung melakukan pengungkapan informasi keuangan. Selanjutnya tidak terdapat daerah dengan Kompleksitas tinggi dan tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 7. Kompleksitas Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Kompleksitas Pemerintah	Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan				Total
	Di atas Rata-Rata (0,4118)		Di bawah Rata-Rata (0,4118)		
Di atas Rata-Rata (15,294)	12	35%	0	0%	12
Di bawah Rata-Rata (15,294)	6	18%	16	47%	22
Total	18		16		34

Sumber: Data Diolah, 2022

Sementara itu, sebesar 18% atau 6 sampel data dengan Kompleksitas Pemerintah di bawah rata-rata melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan. Kemudian sisanya sebesar 47% atau 16 sampel data lainnya memiliki Kompleksitas Pemerintah di bawah rata-rata tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan di bawah rata-rata. Dalam situasi ini dijelaskan jika ditemui beberapa pemerintah provinsi dengan perolehan kompleksitas rendah dan tidak melakukan pengungkapan terhadap informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) dalam Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi Kekayaan Daerah sebesar $0,049 < 0,05$ yang mencerminkan bahwa kekayaan daerah pemerintah secara parsial berpengaruh positif atas pengungkapan informasi keuangan. Kekayaan daerah berpengaruh positif, karena suatu daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi akan semakin tinggi juga kemungkinan suatu daerah termotivasi untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

Tabel 8. Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan

Kekayaan Daerah	Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan				Total
	Diatas Rata-Rata (0,4118)		Dibawah Rata-Rata (0,4118)		
Diatas Rata-Rata (28,348)	15	44%	1	3%	16
Dibawah Rata-Rata (28,348)	3	9%	15	44%	18
Total	18		16		34

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Kekayaan daerah yang tinggi dapat diartikan jika memiliki kinerja yang baik akan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan, agar memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa kebutuhan yang dapat ditanggung pemerintah semakin banyak, contohnya pengelolaan *website* pemerintah daerah yang berfungsi untuk memuat informasi untuk masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan. Pemanfaatan *website* resmi pemerintah daerah secara maksimal dapat mengurangi kesenjangan informasi.

Hasil ini menunjang hasil riset yang dilakukan oleh Nurhidayati & Rahayu (2020), Hadis (2018), dan Rahim et al., (2020) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tabel 8 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 44% atau 15 sampel data dengan Kekayaan Daerah diatas rata-rata melakukan pengungkapan informasi keuangan. Selanjutnya sebesar 3% atau 1 sampel data dengan Kekayaan Daerah diatas rata-rata tetapi enggan melakukan pengungkapan informasi keuangan.

Sementara itu, sebesar 9% atau 3 sampel data dengan Kekayaan Daerah dibawah rata-rata melakukan pengungkapan informasi keuangan. Kemudian sisanya sebesar 44% atau 15 sampel data lainnya memiliki Kekayaan Daerah dibawah rata-rata tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan dibawah rata-rata. Situasi tersebut menjelaskan bahwa ditemui beberapa daerah yang memiliki kekayaan daerah diatas rata-rata dan cenderung mampu melakukan pengungkapan terhadap informasi keuangan dan non keuangan melalui website resmi pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan berikut dapat dicapai dari pengujian data dan analisis dari 34 sampel pemerintah daerah selama satu tahun yaitu tahun 2020. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan variabel independen indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, dan kekayaan daerah berpengaruh atas variabel dependen pengungkapan informasi keuangan. Keadaan ini dibuktikan dengan hasil pengujian simultan (uji F) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,024 yang mana lebih kecil dari angka signifikansinya yaitu 0,05. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji T), variabel indeks pembangunan manusia, opini audit, dan kompleksitas pemerintah tidak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan. Sedangkan variabel kekayaan daerah berpengaruh ke arah positif terhadap pengungkapan informasi keuangan. Mengenai hal tersebut, perolehan nilai Sig. sebesar 0,049 yang mana lebih kecil dari angka signifikansinya yaitu 0,05 yang berarti H_0 diterima.

Saran

Bertumpu pada hasil riset yang telah dilakukan, penulis ingin membagikan saran bagi periset selanjutnya yang hendak menggunakan pengungkapan informasi keuangan sebagai variabel terikat dan menetapkan variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam riset ini dapat menggunakan variabel kondisi keuangan, kesejahteraan masyarakat, ukuran pemerintah, persaingan politik, tingkat ketergantungan, dan lainnya. Serta, menambah rentang waktu penelitian. Bagi pemerintah sebagai pengendali perlu menegakkan peraturan mengenai pengungkapan informasi informasi publik yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Pemerintah diharapkan dapat termotivasi untuk mengembangkan website resmi daerahnya untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan dan non keuangan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi kesenjangan informasi diantara masyarakat sehingga terciptanya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19–31. <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Evada, D., Jauhari, H., & Khoirunisa, A. (2020). The influence Of Complexity And Audit Finding On The Disclosure Regional Financial Statements In Indonesia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 6(3), 1–18. <https://doi.org/10.32602/jafas.2020.015>
- Fachru, R. (2018). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-ReferenceGuide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>
- Faruqi, R. A. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-201). *Akrab Juara*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Hadis, M. (2018). *Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2014)*. 1–23.
- Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Akuntansi Keuangan*, 9(1), 14–27.
- Kurniati, Sari, & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–13.
- Makmum, M. S., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3507. <https://core.ac.uk/download/pdf/299925198.pdf>
- Martani, D., & Liestiani, A. (2012). Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*, 67–84.
- Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 87–95.
- Puspa, A., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Umur Administratif Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2019). *E Proceeding of Manegement*, 8(5), 5082–5089.
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 456(Bicmst), 1–6. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.001>
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2019b). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>